

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenaikan garis kemiskinan menggambarkan bahwa kesejahteraan yang menjadi tujuan negara belum terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2013 yakni “garis kemiskinan pada maret 2013 adalah Rp. 284.454.- per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 321.056.- per kapita pada September 2014 (www.yogyakarta.bps.go.id, diakses tanggal 24 September 2016 pukul 15.36 WIB).

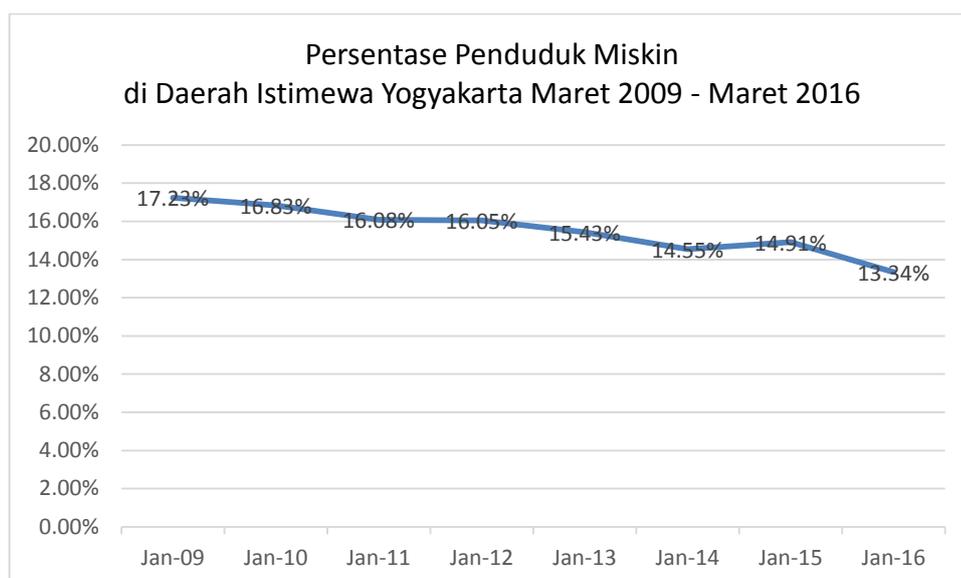
Pada dasarnya, permasalahan yang kompleks ini tidak mutlak dibebankan pada negara, walaupun negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan penduduk. Akan tetapi beberapa lembaga (lembaga-lembaga keuangan) juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membantu masyarakat untuk berwirausaha yaitu dengan meningkatkan produktifitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adanya pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut akan sangat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia (Republika, Kamis 21 Nopember 2013, hal : 13).

Sektor ekonomi merupakan suatu masalah jangka panjang yang harus diatasi oleh setiap negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia.

Salah satu masalah dalam sektor ekonomi di Indonesia yang harus menjadi bahan perhatian pemerintah adalah masalah kemiskinan. Salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan terparah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, dan tingkat ketimpangan (rasio gini) DIY berada di bawah Papua (www.harianjogja.com, 6 April 2016, diakses tanggal 24 September 2016 pukul 16.01 WIB).

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin ada 494,94 ribu orang. Bila dibandingkan setahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin mencapai 550,23 orang atau turun sebesar 55,29 ribu jiwa (www.yogyakarta.bps.go.id). Seperti yang dapat kita lihat pada grafik dibawah ini, setiap tahunnya jumlah penduduk miskin di DIY semakin menurun

Grafik 1.1



Sumber : yogyakarta.bps.go.id 2016

Salah satu lembaga yang mampu meningkatkan potensial usaha masyarakat adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang relatif kecil dan fleksibel untuk melayani usaha mikro-kecil adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Syariah. Operasionalnya sangat mendukung dan menunjang perekonomian rakyat khususnya mikro dan kecil melalui kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah (Supardie, 2013: 14). Keberadaan BMT membantu menjawab keterbatasan masyarakat kecil dalam mengakses peminjaman.

Melalui BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan sistem *riba* (bunga) dan mengalihkannya kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil. BMT mendapat respon yang positif dari masyarakat karena BMT tergolong lebih lincah dan fleksibel, karena tak *fully regulated*. Hal ini menyebabkan konsep BMT mampu dihadirkan di area masyarakat kecil (Soedjito, 2006: 24).

Dengan demikian, strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi (Hermawan, 2002: 67).

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk *Baitul maal Waa Tanwil* (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional sampai Maret 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Selain itu dari segi jumlah BMT juga meningkat, berdasarkan data Perhimpunan BMT Indonesia, diperkirakan ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi sampai dengan akhir tahun 2014 (www.republika.co.id, diakses tanggal 25 Nopember 2016 pukul 20.14 WIB)

Perkembangan jumlah BMT juga terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data yang dihimpun oleh ABSINDO (Asosiasi *Baitul Maal Wa Tamwil* Se-Indonesia) DIY menyatakan sampai dengan Maret 2015 terdapat sekitar 130 BMT yang menjadi anggota di PUSKOPSYAH (Pusat Koperasi Syariah) DIY, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah BMT Anggota PUSKOPSYAH DIY

Kabupaten/Kota	Jumlah BMT
Kota Yogyakarta	42
Kab. Sleman	40
Kab. Bantul	32
Kab. Kulon Progo	10
Kab. Gunung Kidul	6

Sumber : *absindodiy.net 2015*

Dengan jumlah BMT yang semakin menjamur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maka semakin mudah pula bagi LKMS untuk menyalurkan dana mereka kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan pada jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut sesuai dengan tujuan BMT yang sebagaimana desain awalnya adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi bagi usaha mikro dan kecil. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut BMT memiliki fungsi pendampingan terhadap usaha mikro dan kecil dengan memberikan bimbingan usaha, memobilisasi dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya (Aziz, 1998: 3).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM. Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relatif dapat lebih mudah diakses sebagian besar UMKM yang *unbankable*. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional yang menerapkan sistem bunga sehingga dapat membebani UMKM. Selama beroperasi, BMT menunjukkan peranannya yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pembiayaan dari tahun ke tahun yang terdapat dalam data Induk Koperasi Syariah, yakni:

Tabel 1.2
Laporan keuangan INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) per Juni

No	Tahun	Pembiayaan yang diberikan
1	2009	Rp. 28.827.535.576,21
2	2010	Rp. 87.217.899.910,80
3	2011	Rp. 97.207.809.610,10
4	2012	Rp. 124.474.974.064,00
5	2013	Rp. 163.926.961.071,00

Sumber data : www.inkopsyah.co.id 2013

Dengan pembiayaan yang cukup tinggi ini, namun masih tetap ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota yakni dari segi permodalan sebesar 37,13 persen (Sumber Data : BPS DIY 2013).

Pada tahun 2014 jumlah UMKM di Indonesia ada sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 persen, dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen (www.beritasatu.com, diakses tanggal 30 September 2016 pukul 20.16 WIB).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga senantiasa mengalami pertumbuhan hingga 10 persen per tahun. Hingga akhir desember 2015 kemarin, Dinas Koperasi dan UKM DIY mencatat total jumlah UMKM sebanyak 230.047. Dari total tersebut tercatat sekitar 30 persen termasuk kedalam golongan usaha kecil (<http://disperindag.jogjaprovo.go.id/> diakses pada tanggal 30 September 2016 pukul 20.39 WIB).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Merujuk data Dinas Koperasi dan UKM DIY, 95 persen perekonomian DIY disumbang oleh UMKM, sebuah angka yang besar. Kepala Bidang UMKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Agus Mulyono menuturkan bahwa Mikro mendominasi 55 persen, kecil 25 persen, menengah 15 persen sedangkan yang besar lima persen (www.tribunjogja.com, di akses tanggal 02 Oktober 2016 pukul 11.37 WIB).

Akses permodalan merupakan salah satu masalah yang dekat dengan usaha kecil di DIY. Dimana hal tersebut nantinya akan berimbas ke pengembangan kapasitas produksi dan juga pemasaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan optimalisasi peran UMKM khususnya usaha kecil dalam pemberdayaan masyarakat di Jogja, maka BMT sebagai LKMS harus dapat menyalurkan pembiayaannya secara optimal. Lebih dari itu kehadiran BMT yang operasionalnya berdasar pada prinsip syariah juga bisa dijadikan pilihan dan peluang untuk memberikan jalan keluar bagi usaha kecil dalam mengakses dana atau modal untuk pembiayaan operasional usahanya. Karena misi utama didirikan BMT berorientasi pada pendistribusian laba yang merata, bagi hasil yang adil, *gotong-royong (ta'awun)* sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Supadie, 2013: 18).

Keberadaan BMT sangat membantu dalam mendapatkan pembiayaan sekaligus dapat mengatasi masalah permodalan guna memperkuat usaha para anggota untuk mengembangkan usahanya. Jika BMT lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya, maka usaha serta hasil yang didapatkan oleh pedagang dan BMT yang dominan menggandalkan sistem bagi hasil ini diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan usaha. Salah satu BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah adalah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang didirikan pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta (bmt-bif.co.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 20.45 WIB).

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga karena selama ini dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besar dan juga merupakan praktek riba serta sangat memberatkan masyarakat (bmt-bif.co.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 20.45 WIB).

Semakin tahun kinerja BMT BIF semakin meningkat, sampai dengan tahun 2015 aset BMT BIF sudah mencapai Rp 69.597.242.345 (bmt-bif.co.id). Selain itu, setiap tahunnya jumlah anggota (nasabah) di BMT BIF cabang Yogyakarta juga semakin meningkat. Pada tahun 2015 dalam catatan buku RAT BMT BIF Yogyakarta jumlah anggotanya

mencapai 32.888 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk jumlah anggota penabung dan peminjam.

Dengan total aset yang semakin bertambah dan jumlah anggota yang semakin meningkat, maka diharapkan BMT BIF dapat mengoptimalkan peran mereka dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor sektor UMKM agar dapat memberdayakan masyarakat Jogja menjadi lebih sejahtera. Apalagi pada zaman yang semakin maju dan modern ini, potensi dan peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha semakin terbuka lebar.

Untuk mengetahui peran BMT dalam menyentuh usaha para anggotanya, serta dalam membangkitkan kesadaran atau memotivasi masyarakat khususnya masyarakat yang dalam keseharian agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta membantu masyarakat untuk menginvestasikan sebagian pendapatan mereka dengan aman tanpa adanya riba melalui usaha kecil, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“OPTIMALISASI PERAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN USAHA KECIL (Studi Kasus Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta) ”**.

B. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti perlu membuat batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian

ini. Penelitian ini difokuskan pada Peran BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Yogyakarta, serta nasabah Pembiayaan Usaha Kecil di BMT BIF Cabang Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Dengan peran pembiayaan yang diberikan BMT menjadi sebuah alternatif yang dapat membantu perkembangan usaha para anggotanya. Untuk itu, perlu diteliti peran BMT dalam berkontribusi pada optimalisasi ekonomi rakyat, sehingga dapat diperkirakan gambaran dampak pembiayaan tersebut. Dari uraian di atas, maka dirumuskan pokok pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BMT BIF dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil ?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan yang dilakukan BMT BIF terhadap pelaku usaha kecil setelah mendapatkan pembiayaan?
3. Bagaimana optimalisasi peran BMT BIF dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran BMT dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil.
2. Mengetahui hasil pemberdayaan yang dilakukan BMT terhadap usaha kecil setelah mendapatkan pembiayaan.
3. Mengetahui optimalisasi peran BMT dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti: hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan referensi awal dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi peran BMT dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil.
- b. Bagi Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pihak yang bersangkutan serta mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta masukan dan referensi khususnya bagi prodi Ekonomi Perbankan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT : Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan informasi tambahan mengenai penyaluran pembiayaan atau kredit yang efektif dan efisien. Sehingga manajemen pembiayaan yang diterapkan akan semakin baik.
- b. Sebagai upaya untuk mengembangkan peran BMT dalam pembiayaan terhadap usaha kecil yang berdampak pada perekonomian nasional.